



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Nomor : W9-A/ 2359 /HM.02.1/9/2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka perlu ditunjuk Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan secara elektronik (e-LHKPN);
- b. bahwa nama-nama pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai petugas Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan secara elektronik (e-LHKPN);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;**
- Pertama : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan secara elektronik (e-LHKPN) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Kedua : Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan secara elektronik (e-LHKPN) bertugas untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN (<https://elhkpn.kpk.go.id>) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Jakarta
pada tanggal : 14 September 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,



H. M. S. ARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
1231 198103 1 092

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor W9-A/ 2359 /HM.02.1/9/2021
Tanggal 14 September 2021

**PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA
SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

No	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	ELVIRA AMEGIA, M. Kom. NIP. 19811216 200904 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Ketua/Anggota	
2	HIRDA ARINDAH, A.Md. NIP. 19850908 201503 2 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Fungsional Analisis Kepegawaian jenjang Terampil	Anggota	
3	DINI MUTHIA UTAMI, S.Kom. NIP. 19910724 202012 .007	Penata Muda (III/a)	CPNS Pranata Komputer	Anggota	



Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,

Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NID. 1941231 198103 1 092